

BAB 1

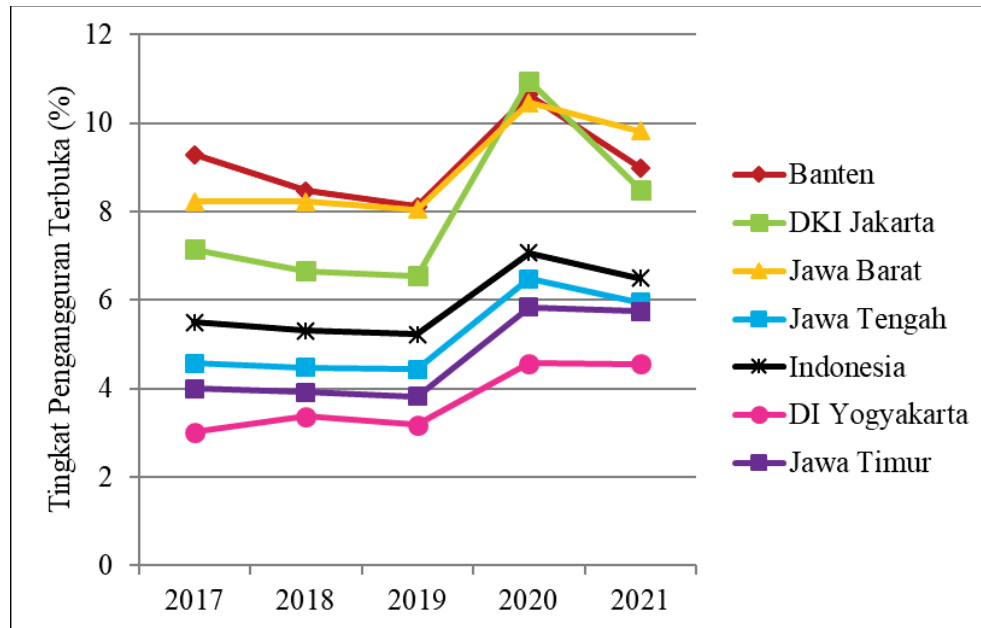
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dari beberapa indikator, salah satunya yakni melalui tingkat pengangguran. Saat ini, masalah besar yang dihadapi pembuat kebijakan ialah pengangguran. Pengangguran dipandang sebagai hal yang memprihatinkan bagi perekonomian, karena semakin tinggi angka pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan seperti kriminalitas dan kemiskinan (Diakhoumpa, 2020). Pengangguran terjadi karena peningkatan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Penciptaan lapangan pekerjaan yang rendah, tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai parameter untuk mengukur pengangguran yaitu menunjukkan persentase dari angkatan kerja yang masuk dalam pengangguran.

Pengangguran merupakan masalah yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat pengangguran di wilayah bagian Indonesia Barat lebih persisten daripada Indonesia Timur (Soekarni *et al.*, 2009). Di Pulau Jawa terdapat tiga provinsi yang menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia tahun 2017-2021, karena angka TPTnya yang selalu berada di atas angka TPT nasional. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah menduduki tingkat pengangguran tertinggi ke empat di Pulau Jawa. Namun angka TPT Jawa Tengah ini masih lebih baik karena berada di bawah angka TPT nasional. Hal ini dapat dibuktikan pada Gambar 1.1 yang memperlihatkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia dan enam provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Pada gambar di bawah ini terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah tahun 2017-2019 berada pada kisaran 4 persen, namun pada tahun 2020 meningkat signifikan sebesar 2,04%. Data publikasi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan TPT di Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 4,57%, pada tahun 2018 menurun menjadi 4,47%, lalu di tahun 2019 menurun menjadi 4,44%,



Gambar 1. 1

**Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia
(dalam persen), 2017-2021**

Sumber: BPS

namun di tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 6,48%. Selanjutnya di tahun 2021 TPT Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 5,95%. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi sebuah permasalahan kompleks yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten/kota (Sumaryoto et al., 2020). Tarsidin (2009) mengkaji persistensi pengangguran di Indonesia dan mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pengangguran struktural ialah upah riil sektoral dan produktivitas tenaga kerja sektoral. Sementara Variabel ekonomi makro yang dianggap dapat mempengaruhi pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi, suku bunga, inflasi, ekspor, dan jumlah uang beredar (Dogan, 2012).

Faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi pengangguran ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai agregat makroekonomi yang menilai kesehatan perekonomian suatu daerah (Diakhoumpa,

2020). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah mencerminkan makin baiknya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Ketika ekonomi tumbuh, lebih banyak kesempatan kerja diciptakan sehingga orang dipekerjakan untuk mengambil bagian dalam produksi permintaan output (Alrayes & Abu Wadi, 2018). Sesuai dengan pernyataan Hukum Okun yang menyatakan bahwa penurunan PDB sebesar 2 persen akan menaikkan tingkat pengangguran 1 persen (Samuelson & Nordhaus, 2010:597).

Faktor lain yang mempengaruhi pengangguran ialah IPM. IPM ialah ukuran pencapaian pembangunan manusia berdasarkan aspek dasar kualitas hidup. BPS menjelaskan bahwa IPM dibangun oleh tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut ialah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan taraf hidup yang layak. Nilai IPM yang makin tinggi, berarti pencapaian pembangunan manusianya makin baik. Hubungan antara IPM dengan tingkat pengangguran berlawanan arah, artinya ketika IPM mengalami kenaikan maka tingkat pengangguran akan turun (Sumaryoto *et al.*, 2020).

Upah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah menurut UU No/13/Th/2003 pasal 1 ayat 30 ialah hak yang diperoleh pekerja dari perusahaan yang memberikan pekerjaan berupa uang atas apa yang dikerjakan, dan akan dibayar berdasarkan perjanjian yang telah dibuat atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan upah minimum merupakan standar pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah untuk melindungi perkerja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Muryani, 2019). Sementara bagi perusahaan, meningkatnya upah akan menambah pengeluaran maka upah harus ditekan seefisien mungkin. Dengan menaikkan upah pekerja di atas tingkat ekuilibrium maka penawaran jumlah tenaga kerjanya meningkat dan mengurangi jumlah yang diminta, Surplus tenaga kerja yang dihasilkan merupakan pengangguran (Mankiw, 2018: 597).

Selain upah, faktor yang berpengaruh ialah jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk dapat menjadi pengaruh negatif jika tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, namun jika ditangani dengan baik akan memberikan pengaruh positif dalam pembangunan ekonomi. Bertambahnya jumlah penduduk

menyebabkan jumlah angkatan kerja meningkat. Angkatan kerja yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun tidak dapat diserap sepenuhnya dan akhirnya akan mengakibatkan pada peningkatan jumlah pengangguran (Soekarni *et al.*, 2009). Hal ini memberikan makna bawasanya makin banyak orang yang mencari pekerjaan, apabila tidak diikuti oleh kenaikan jumlah kesempatan kerja akan berdampak buruk bagi suatu daerah. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi akan menuntut penciptaan lapangan pekerjaan yang tinggi (Heliati, 2019). Jika permasalahan ini tidak terselesaikan, tingkat pengangguran akan makin tinggi. Maka dari itu pertambahan jumlah penduduk menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar tidak memperparah tingkat pengangguran.

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa faktor yang dianalisis dalam penelitian ini ialah faktor sosial dan ekonomi yaitu seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Jumlah Penduduk. Oleh karena itu sangat perlu melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 - 2021.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian dari Dogan (2012) yang menyelidiki pengangguran dan menyatakan bahwa pertambahan PDB, pertambahan ekspor dan inflasi mengurangi pengangguran tetapi nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar meningkatkan pengangguran. Penelitian ini juga mencoba melengkapi penelitian terdahulu dari Soekarni *et al.*, (2009), Panjawa dan Soebagiyo (2014), Sumaryoto *et al.*, (2020). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terdapat pada variabel, wilayah, dan periode penelitian yang lebih baru.

Variabel yang digunakan yaitu Produk Domestik Bruto Regional, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk. Wilayah observasi yaitu 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode tahun terbaru yaitu mulai tahun 2017 hingga 2021 dan data yang

bersumber dari BPS. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan, dengan begitu pemerintah dapat berinovasi untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh Produk Domestik Bruto Regional, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan teknik analisis regresi data panel. Penelitian kuantitatif ini menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel dependen, serta PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk sebagai variabel independen. Data sekunder digunakan yaitu data tahunan yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 yang selanjutnya diolah menggunakan *software STATA 15*.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan variabel $\ln PDRB$, IPM , $\ln UMK$, dan $\ln JP$ memiliki hubungan yang signifikan terhadap TPT di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan variabel $\ln PDRB$ memiliki nilai koef sebesar -13.91205 dan nilai prob sebesar 0.000. Variabel IPM memiliki nilai koef sebesar -0.8683386 dan nilai prob sebesar 0,033. Variabel $\ln UMK$ memiliki nilai koef sebesar 17.87374 dan nilai prob sebesar 0.040. Variabel $\ln JP$ memiliki nilai koef sebesar -4.581011 dan nilai prob sebesar 0.000. Hal ini membuktikan bawasannya faktor ekonomi dan sosial seperti Produk Domestik Bruto Regional, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk

berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi riset ini berupa penambahan bukti empiris dan dapat bermanfaat guna mengetahui faktor yang diduga mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Jumlah Penduduk. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi pertimbangan oleh pemerintah untuk keperluan perencanaan dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik yang dapat mengurangi masalah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

1.7 Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian ini memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mengandung teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu untuk menunjang penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian memuat pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta teknik analisis yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan memuat gambaran umum dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat deskripsi statistik variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, serta interpretasi hasil.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penutup yang memuat ringkasan hasil penelitian, kesimpulan yang menjelaskan secara singkat tentang temuan yang diperoleh pada penelitian ini. Selain itu terdapat saran yang ditujukan untuk pengambil kebijakan, dan keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN